

PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT ADAT DESA KAKARA PADA PEMILUKADA MALUKU UTARA 2018

Gloria Miagina Palako Djurubassa, Herman Sidete

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Halmahera

Email: ipalakoka@gmail.com

ABSTRACT

This research is about voting behaviour of indigenous people at Kakara Village in North Mollucas election 2018. On the previous Governor election in 2013 and Regent election in 2015, typology of North Mollucas Voter is traditional voter category and most of them spread to littoral and inland villages. This research be doing at Kakara village with purpose to reveal how is voting behavior of indigenous people at Kakara village to vote their governor and vice governor, and the causes of it. The method of this research is qualitative which is to explain and describe the facts of voting behavior of indigineous people as voter. Design of this research is case study with the research object such as important people in the custom, community, religion, and some of people at Kakara village. Collecting data technique be doing by observation, sharing questionnaire and deep interview to some of respondence by choosing as purposive to get data about social structure of indigineous people, identification of voting behavior and mass base of candidate. Voting behavior of indigineous people at Kakara village as a traditional voter when to deal with black campaign, identity issue, and religious issue certainly will be implicated to their choice in Governor and vice governor election. This is the interesting point that make this research should be investigated because voting behavior especially in North Halmahera always changed since election in 2015. The result of this research can be used as a basic by government, political party and academic to take policy as a problem solution to Indigineous People at Kakara Village.

Keywords: *Voting Behavior, Indigenous People, Regional Head Election*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) adalah sebuah bentuk perwujudan dari demokrasi yang ada di Indonesia, hal ini tercantum dalam PERPU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan demokratis sebagai bentuk kedaulatan rakyat, maka partisipasi politik masyarakat sangat penting dalam proses penentuan pemimpin suatu daerah. Pemilihan umum kepala daerah Maluku Utara Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk memilih kepala daerah yang berintegritas, bertanggungjawab, berjiwa pancasila. Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara pada beberapa tahun lalu, meninggalkan cerita pahit di dalam hati masyarakat, karena

pasca pemilukada sebelumnya sering terjadi konflik elit politik yang berimplikasi pada konflik antar pendukung atau tim sukses sehingga menimbulkan kekacauan/konflik berkepanjangan.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018, diikuti oleh empat pasangan calon yakni pasangan no urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (diusung partai Golkar dan PPP), pasangan no.urut 2 Dr.H. Burhan Abdurahman, SH.,MH dan Drs.Ishak Jamaluddin,M.Pd (diusung oleh partai NasDem,Partai Demokrat,Partai Hanura, PBB dan PKB), pasangan no urut 3 KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir.M.Al Yasin Ali,M.MT (diusung oleh PDI-P dan PKPI), pasangan no urut 4, Dr. H. Muhammad Kasuba,M.A dan Drs.A.Madjid Husen,M.M (diusung oleh PKS, Partai Gerindra dan PAN).

Pemilih di Maluku Utara dikategorikan sebagai pemilih tradisional, karena mayoritas masyarakat Maluku Utara berbasis adat, Kabupaten Halmahera Utara misalnya, pernah memiliki Bupati yang merupakan Ketua Dewan Adat dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mengembangkan pembangunan desa adat sebagai identitas masyarakat adat lewat simbol Hibualamo yang memiliki nilai-nilai adat (kearifan lokal). Sebagai bagian dari Kabupaten Halmahera Utara, masyarakat desa Kakara merupakan masyarakat desa adat yang masih kental dengan tradisi-tradisinya. Namun saat ini. Ketika diperhadapkan pada tuntutan untuk bisa berperan aktif dalam kegiatan politik seperti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018, kekhasan itu cenderung bersifat modernisasi walaupun masih terasa kearifan lokalnya pada beberapa kegiatan politik.

Pada prakteknya, pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara kali ini agak jauh berbeda dengan pemilihan sebelumnya dimana para elit politik sering memainkan isu-isu identitas etnis, adat-budaya untuk mempengaruhi pemilih (Hasbullah The,2011). Isu identitas seperti coblos baju adat, anak daerah, tuan tanah serta simbol-simbol adat dan budaya digunakan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon/kandidat bukan lagi berdasarkan pada kebijakan program kerja yang ditawarkan oleh kandidat melainkan pada perintah dan kemauan elit politik/tim sukses masing- masing. Hal ini terjadi pada kontestasi politik pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2013 dan Pemilihan Bupati Halmahera Utara tahun 2015, yang menunjukkan bahwa elit politik cenderung memainkan politik identitas dan isu agama sebagai mesin politik untuk menang pada pemilukada. Yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana perilaku pemilih masyarakat adat Desa Kakara dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara 2018-2023? Dan Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat adat Desa Kakara dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta tentang perilaku pemilih masyarakat adat. Sedangkan desain penelitiannya adalah studi kasus. Fokus dari studi kasus ini adalah pemeriksaan kasus yang dipilih secara lebih spesifik dan mendetail untuk menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis bagaimana Perilaku Pemilih Masyarakat Adat Desa Kakara Dalam Memilih Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2018 serta faktor penyebab yang dapat mempengaruhi Perilaku Pemilih Masyarakat Adat Desa Kakara dalam memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data :

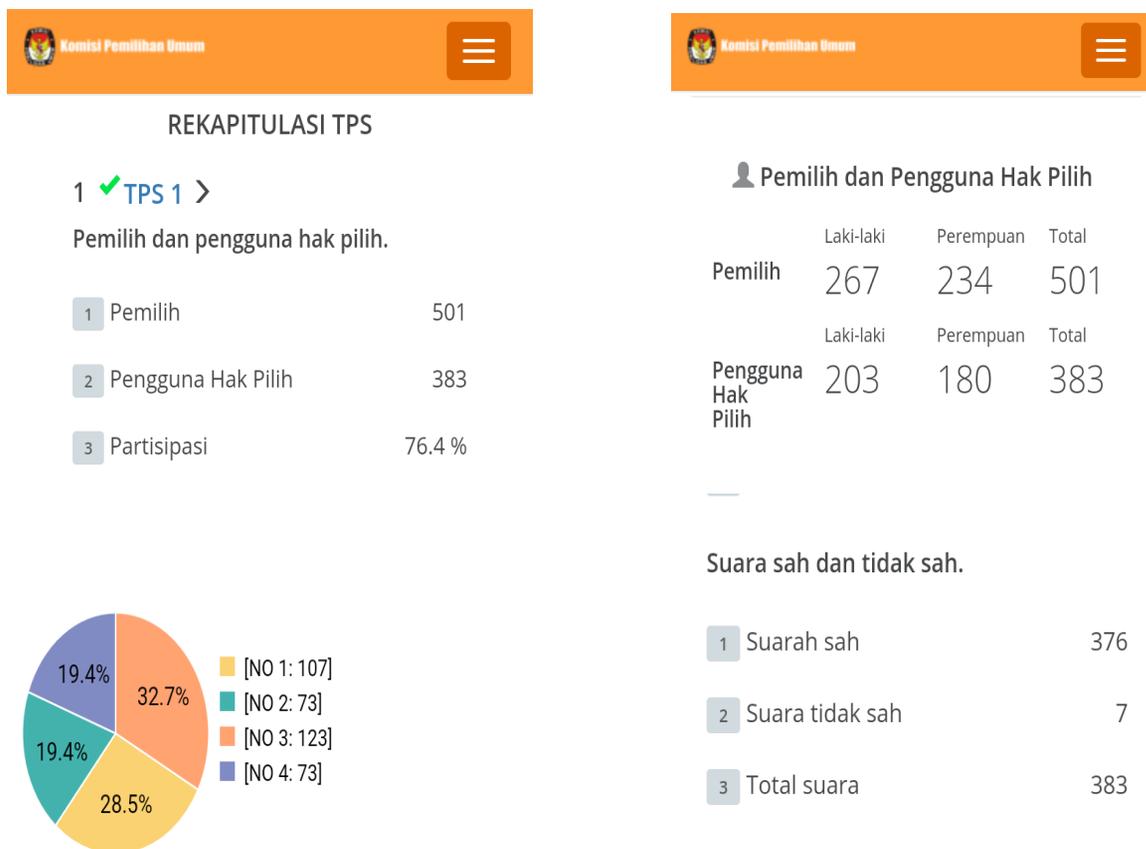
1. Observasi lokasi penelitian dengan tujuan mempelajari bahan-bahan sekunder mengenai masyarakat adat yang di teliti, khususnya terkait perilaku pemilih.
2. Wawancara mendalam yaitu wawancara yang memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur dengan teknik wawancara mendalam (*indepht interview*). Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi lebih luas dari informan penelitian seperti yang disebutkan di atas. Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan kunci yaitu Pemerintah Desa, para Tokoh adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan sebagian Masyarakat Desa Kakara sebagai informan penelitian sesuai dengan kebutuhan peneliti.
3. Kuesioner/Angket disebarakan kedalam beberapa kategori pertanyaan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti. Kuesioner penelitian dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan singkat, jelas dan baik yang ditarik dari rumusan masalah penelitian.
4. Kajian dokumentasi merupakan sejumlah data sekunder yang diperoleh dari Desa dan lembaga yang terkait dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan dengan mereduksi data yang dikumpulkan, merangkumnya menjadi catatan temuan lapangan, menyajikannya dalam bentuk teks sehingga mendapatkan jawaban dan kesimpulan dari pertanyaan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di Desa Kakara, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018

Berdasarkan data yang di publikasi KPUD Propinsi Maluku Utara, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Desa Kakara, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, diikuti oleh 383 pemilih dengan partisipasi pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 203 pemilih dan perempuan 180 pemilih. Sementara data DPT jumlah Pemilih di Desa Kakara tahun 2018 adalah 501 pemilih yakni 267 pemilih laki-laki dan 234 pemilih perempuan.



Sumber : Data KPU Tahun 2018 <http://infopemilu.kpu.go.id>

Dari hasil *real count* yang di publikasi KPU di laman <http://infopemilu.kpu.go.id/> untuk Desa kakara TPS 1 Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Pasangan no urut 3 yakni KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir.M.AI Yasin Ali,M.MT unggul dari pasangan lainnya yaitu memperoleh suara 32,71% yakni 123 suara dari total 383 pemgguna hak pilih di Desa kakara. Sementara pasangan calon no urut 1 Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar, memperoleh 107 suara atau sebanyak 28,46%. Dua pasangan calon lainnya yakni no.urut 2 Dr.H. Burhan Abdurahman, SH.,MH dan Drs.Ishak Jamaluddin,M.Pd dan pasangan no urut 4, Dr. H.

Muhammad Kasuba,M.A dan Drs.A.Madjid Husen,M.M, masing-masing memperoleh 73 suara yakni sebanyak 19,41%.

B. Perilaku Pemilih Masyarakat Adat Desa Kakara

Perilaku pemilih merupakan tindakan para pemilih dalam memberikan suaranya pada pemilihan umum. Perilaku pemilih dalam pemilu merupakan salah satu bentuk perilaku politik. Menurut Mahendra (2005:75), perilaku pemilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik ataupun isu publik tertentu. Sementara perilaku pemilih menurut Ramlan Surbakti (dalam Efriza 2012:480) adalah “Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”.

Menurut Ramlan Surbakti (2010 : 46), perilaku memilih dapat dilihat dari beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih. Pengelompokan sosial ini misalnya berdasarkan umur, jenis kelamin, agama, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Untuk itu pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi keagamaan, organisasi profesi dan sebagainya, maupun kelompok informal seperti keluarga, pertemanan atau kelompok-kelompok kecil lainnya. Hal ini merupakan sesuatu yang vital dalam memahami perilaku politik, karena kelompok-kelompok ini mempunyai peranan besar dalam bentuk sikap persepsi dan orientasi seseorang. Jadi keanggotaan seseorang kepada kelompok-kelompok sosial tertentu dapat mempengaruhi seseorang di dalam menentukan pilihannya pada saat proses pemilihan.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologis terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk memperjelas perilaku pemilih. Para pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan variabel yang menentukan perilaku politiknya.

3. Pendekatan Rasional

Pendekatan ini menjelaskan bahwa kegiatan memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat

mempengaruhi hasil yang diharapkan , tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Jadi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih (Surbakti : 1992 : 50)

Sedangkan masyarakat adat menurut konvensi ILO 169 (1989) adalah masyarakat asli yang berdiam di negara-negara yang merdeka, dimana kondisi sosial, budaya dan ekonomi mereka berbeda dari masyarakat lainnya di negara tersebut, dan statusnya baik seluruhnya maupun sebagian di atur oleh adat dan tradisinya atau dengan hukum/peraturan yang khusus.

Masyarakat adat menurut Permen Agraria/Kpla BPN No.5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Masyarakat adat menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara Pertama di Jakarta, Maret 1999, adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Jadi, bisa disimpulkan masyarakat adat adalah suatu komunitas, hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun, ada di suatu wilayah adat (tanah ulayat), memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam serta kehidupan sosial budaya, diatur oleh hukum adat, lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data dari buku Monografi Desa Kakara, jumlah penduduk desa tahun 2018 adalah sebanyak 856 jiwa. Mayoritas penduduk beragama kristen dan ada juga yang beragama islam. Kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat tidak terlalu nampak di desa karena secara ekonomi tidak ada keluarga yang sangat kaya. Rata-rata masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh, petani dan nelayan karena lokasi desa yang merupakan pulau yang dikelilingi lautan. Jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT pada pemilu pada 2018 adalah sebanyak 501 pemilih, sedangkan yang aktif menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 383 pemilih, ini berarti ada 118 pemilih di Desa Kakara yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018.

Pertumbuhan jumlah penduduk Desa Kakara sampai pada Tahun 2018 ada sebanyak 216 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 856 jiwa yang terdiri dari 437 jiwa laki-laki dan 419 jiwa perempuan. Rata-rata setiap keluarga terdiri dari tiga-empat anggota keluarga. Komposisi penduduk menurut umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Penduduk Menurut Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1.	0 – 15	305 Orang
2.	16 – 65	458 Orang
3.	65 – ke atas	93 Orang
	Jumlah	856 Orang

Sumber : Buku Monografi Desa Kakara (2018)

Dari tabel di atas dapat diamati bahwa golongan usia produktif sebesar (53.%) dan golongan usia tidak produktif adalah (47.%). Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemilih masyarakat desa Kakara didominasi oleh usia produktif yang bisa jadi lebih aktif dan selektif dalam memberikan pilihan politiknya, sementara itu tingkat pendidikan di Desa Kakara cukup baik dapat dilihat dari tidak adanya warga yang putus sekolah maupun yang tidak lulus, ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Kakara memenuhi kategori pemilih rasional maupun pemilih kritis jika dilihat dari tingkat pendidikannya. Kedepannya Desa Kakara akan memperbaiki diri terutama di bidang pendidikan, Komposisi penduduk desa Kakara berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kakara

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Orang
1	Tidak Lulus	-	Orang
2	Tidak Bersekolah	-	Orang
3	PAUD	-	Orang
4	TK	-	Orang
5	SD / MI	242	Orang
6	SMP / MTS	215	Orang
7	SMA / MA	114	Orang
8	Akademik D1 / D2 / D3	10	Orang
9	Sarjana	12	Orang
10	Pasca Sarjana	-	Orang
11	Kursus Ketrampilan	-	Orang

	Jumlah	593	Orang
--	---------------	------------	--------------

Sumber : Buku Monografi Desa Kakara (2018)

Dari hasil penyebaran kuesioner/angket pada 30 responden di desa Kakara, beberapa pemilih menggunakan pendekatan psikologis dibandingkan pendekatan sosiologis dalam memilih kandidat. Kemampuan kandidat dalam menjalankan pemerintahan (*personality*), pengalaman kandidat no urut 3 sebagai petahana mampu membuat mayoritas masyarakat adat desa kakara memilih beliau. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para tokoh masyarakat, identifikasi kepartaian menjadi alasan kuat dipilihnya pasangan mo urut 3 karena didukung oleh PDI-P dan PKPI.

Pendekatan sosiologis seperti agama dan suku atau karena kedekatan secara kekeluargaan bukan lagi menjadi penting bagi masyarakat adat desa Kakara, kekecewaan yang dirasakan dari pemilihan Gubernur sebelumnya hingga berujung pada konflik menjadi salah satu alasan penting. Pada dasarnya mayoritas masyarakat desa Kakara menganggap bahwa pemilihan Gubernur tidak menjadi tolak ukur maju tidaknya Desa Kakara, para kandidat dan pasangan calon tidak dikenal secara dekat oleh masyarakat, berbeda halnya dengan pemilihan Bupati atau Pemilihan Kepala Desa. Asalkan sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik, berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah dengan memberikan pilihan politiknya kepada salah satu kandidat yang dianggap terbaik, itu sudah cukup.

Untuk melihat perilaku pemilih masyarakat adat desa kakara, peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Firmazah (2008), mengenai jenis-jenis perilaku pemilih :

1. Kategori Pemilih Rasional

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa pemilih rasional pada masyarakat desa Kakara, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Ketika ditanyai alasan mereka dalam memilih kandidat tertentu pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 lalu. Karena sebagian dari mereka memperhitungkan apa keuntungan bagi diri mereka jika memilih kandidat yang mereka sukai. Bagi peneliti, hal itu dimungkinkan karena tingkat pendidikan para masyarakat yang menjadi informan terlihat sudah cukup baik. Disamping itu pengalaman mereka dalam hal pemilihan umum sudah banyak sehingga dalam membuat keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan rasional. Terkait dengan pasangan calon peserta pemilihan gubernur saat itu, KH. Abdul Gani Kasuba dan .Al Yasin Ali dianggap oleh para informan dilihat dari program yang mereka tawarkan, merupakan pasangan yang paling mampu memenuhi kebutuhan mereka jika terpilih. Terkait dengan faktor identitas terlebih asal-usul, pada pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur memang tidak menjadi masalah bagi mereka menurut sebagian masyarakat yang

menjadi informan ini. Karena menurut mereka, para pasangan calon adalah orang-orang terbaik di Maluku Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pemilih masyarakat adat Desa Kakara merupakan kategori pemilih yang rasional.

2. Kategori Pemilih Kritis

Pemilih Kritis mementingkan ikatan ideologis dan loyalitas terhadap partai atau kandidat. Pemilih yang masuk dalam kategori jenis ini sangat sedikit dijumpai pada masyarakat adat Desa kakara. Karena kecenderungan untuk mengkritisi pasangan kandidat yang mereka pilih tidak terjadi. Memang dari penjelasan beberapa informan(kurang lebih dua) ada yang mendasari pilihan mereka pada partai tertentu karena pertimbangan ideologi, namun tidak sampai pada tahap mengkritisi program yang ditawarkan kandidat.

3. Kategori Pemilih Tradisional

Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budayanya, nilai, asal usul, faham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih suatu partai politik. Kebijakan seperti ekonomi, kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pendidikan, serta pembangunan dianggap sebagai parameter kedua. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau kandidat. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan sangat konservatif dalam memegang nilai serta faham yang dianut. Kategori pemilih jenis ini walau sedikit tapi juga ada di Desa Kakara. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa jenis pemilih kategori ini agak sulit ditemukan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018. Karena walaupun semua kandidat pasangan calon merupakan anak asli Daerah Maluku Utara namun tidak ada yang benar-benar berasal dari bumi Hibualamo yang merupakan mayoritas pemilih di desa Kakara. Selain itu, semua yang menjadi kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur beragama muslim, berbeda dengan masyarakat desa Kakara yang mayoritas Kristen. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada Pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun 2013, dari 6 pasangan calon saat itu, ada 2 kandidat calon gubernur yang beragama Kristen dan salah satunya merupakan “Jikomakolano” dari bumi Hibualamo.

4. Kategori Pemilih Skeptis

Walau tidak terlalu mengenal sosok kandidat Pasangan calon maupun partai pendukungnya pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, pemilih terakhir ini bisa dibilang sangat sulit ditemui dalam masyarakat Adat Desa Kakara, karena persyaratan kategori pemilih jenis ini tidak terpenuhi.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Masyarakat Adat Desa Kakara

Para pemilih dapat saja memilih seorang kandidat dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, karena dianggap sebagai representatif dari keagamaan. Namun dapat juga ia memilih karena ikatan kepartaian dan juga mewakili kelompoknya. Ada juga pemilih yang memilih calon karena ikatan emosional misalnya taat dan kepatuhan terhadap seseorang dengan ikatan loyalitas terhadap figur bersangkutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut diperlukan dalam rangka para kandidat pasangan calon menyusun strategi pemasaran dirinya atau juga programnya. Informasi mengenai berbagai variabel tersebut jelas berguna dalam menyusun strategi komunikasi, manajemen kandidat, dan penyusunan isu serta kebijakan yang akan ditawarkan kepada para pemilih. Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-des), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.

Namun bagi beberapa masyarakat desa Kakara yang tidak menggunakan hak pilihnya, pendekatan ini bisa menjadi salah satu penyebabnya. Ada juga informan yang mengaku tak punya pilihan politik. Tidak mengenal sosok kandidat pasangan calon ataupun partai pengusungnya. Selain itu juga karena faktor eksternal yakni tidak memiliki KTP atau karena kehilangan KTP sehingga tidak punya hak pilih. Ada masyarakat yang belum memiliki KTP atau NIK, sementara peraturan perundang-undangan mengatur secara signifikan siapa saja yang dikategorikan sebagai pemilih. Padahal bisa jadi, ada masyarakat yang tidak memiliki identitas akibat kelalaian pelayanan publik pihak pemerintah.

Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial, usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal, dan lainnya memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembentukan perilaku pemilih. Kelompok-kelompok sosial itu memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Dalam banyak penelitian, faktor agama, aspek geografis (kedaerahan), dan faktor kelas atau status ekonomi (khususnya di Negara-negara maju) memang mempunyai korelasi nyata dengan perilaku pemilih.

Faktor lain yang cukup berpengaruh yakni Pragmatisme yang ada dalam masyarakat. Bisa dibuktikan pada setiap pelaksanaan pemilu ataupun pemilukada hingga tingkatan pilkades, politik uang selalu saja terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan. Hal itu dilakukan dengan sadar oleh para kandidat yang ikut bersaing dalam proses pemilihan ataupun tim sukses mereka. Besaran uang yang diberikan pun cukup bervariasi, ini diakui menjadi masalah serius oleh beberapa informan di Desa Kakara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis perilaku pemilih masyarakat adat Desa Kakara dalam memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Propinsi Maluku Utara Tahun 2018, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat Adat Desa Kakara merupakan kategori pemilih rasional, walau berada di Pulau yang letaknya lumayan jauh dari pusat kota, masyarakat desa Kakara bisa aktif berpartisipasi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018 yakni sebanyak 76,4 % dari 501 jiwa pilih berdasarkan DPT. Jadi tidak terlalu penting kandidat atau pasangan calon mana yang menang, pada dasarnya masyarakat desa Kakara telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dengan mengikuti proses pemilihan dan tidak golput.
2. Lemahnya posisi masyarakat adat desa Kakara dalam menentukan hak politiknya karena rendahnya kapasitas SDM dan jaringan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Masih ada keterbatasan kapasitas baik dari segi historis maupun sosial budaya karena produk hukum yang ada tidak cukup memperkuat masyarakat adat dalam proses pemilihan umum ditingkat daerah.

Daftar Pustaka

- Hasbullah The. 2011. Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal. *Jurnal Ushuluddin*, XVII(2), 170–182.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mahendra, Oka. 2005.*Pilkada Di Tengah Konflik Horizontal*. Millenium Publisher. Jakarta.
- Efriza, (2012). *Political Explore*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti. Ramlan, 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama.

Firmanzah. 2008. *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia.

Konvensi Ilo No. 169 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat